



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**Direktorat Penanganan Pelanggaran**  
**Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**



## **Teuku Elvitrasyah**

### *Direktur Penanganan Pelanggaran*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pasal 618), Direktorat Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran. Tugas tersebut dijabarkan secara sistematis dan terstruktur melalui penetapan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyusun Laporan Kinerja (LKj) periode Triwulan I – IV tahun 2023. Laporan tersebut merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai alat penilaian kinerja dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran. Penyusunan LKj mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) tahun 2020-2024.

Harapan kami, berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, dapat memberikan gambaran terkait performa kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran, sekaligus menjadi masukan berharga untuk pencapaian kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2024  
Direktur Penanganan Pelanggaran



**Teuku Elvitrasyah**



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Penanganan Pelanggaran menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja yang terdiri dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Manajemen. Nilai pencapaian indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023 mencapai 109,41% dengan kategori “Baik”. Secara ringkas indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja;
3. Target dengan capaian di bawah 100% sebanyak 1 (satu) indikator kinerja.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada tabel berikut.

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>				
<b>Terselenggaranya Penysadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal</b>				
1	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal	73	85,7	117,4
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>				
<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas</b>				
2	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	80	80	100
3	Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif	80	80	100
4	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	80	80	100
5	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	80	80	100
6	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	80	80	100
<b>Sasaran Kegiatan 3</b>				
<b>Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas</b>				
7	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93	92,86	99,85

8	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	70	94,81	120
9	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain	70	85,58	120
10	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100	100	100
11	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	100	100
12	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	77	89,61	116,38
13	Jumlah Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	1	1	100
<b>Sasaran Kegiatan 4</b>				
<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP</b>				
14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	100	100
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	78	87,85	112,63
16	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	80,5	84,1	104,47
17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	75	75	100
18	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PP	99	99,59	100,6
19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	34,72	120
20	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	92	133,33	120
21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	77,5	100	120
22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	77,5	100	120

Capaian indikator kinerja tahun 2023 di atas tidak lepas dari kegiatan-kegiatan penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan antara lain: pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas negara lain, ekspose kasus sanksi administratif SPKP dan non SPKP, supervisi dan monitoring evaluasi kegiatan penanganan pelanggaran, koordinasi dan operasional penyidikan, penyusunan revisi NSPK, bimbingan teknis, dan kegiatan-kegiatan manajerial.

Alokasi anggaran Satker Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023 sebesar Rp.5.465.672.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.5.443.204.575,00 atau 99,59%. Berdasarkan capaian kinerja organisasi 109,41% serta memperhatikan realisasi anggaran sebesar 99,59% diperoleh efisiensi sebesar 89,97% atau kriteria BAIK.



## **Teuku Elvitrysyah**

### *Direktur Penanganan Pelanggaran*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pasal 618), Direktorat Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran. Tugas tersebut dijabarkan secara sistematis dan terstruktur melalui penetapan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyusun Laporan Kinerja (LKj) periode Triwulan I – IV tahun 2023. Laporan tersebut merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai alat penilaian kinerja dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran. Penyusunan LKJ mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) tahun 2020-2024.

Harapan kami, berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, dapat memberikan gambaran terkait performa kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran, sekaligus menjadi masukan berharga untuk pencapaian kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Jakarta, 14 Januari 2024  
Direktur Penanganan Pelanggaran

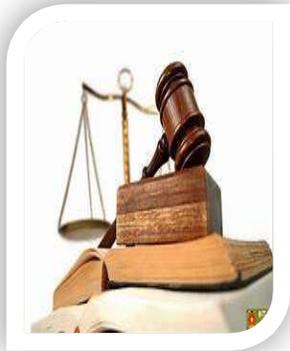
  
Teuku Elvitrysyah



# DAFTAR ISI

---

Ikhtisar Eksekutif .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	I-1
B. Isu Strategis .....	I-2
C. Strategi Penyajian Pelaporan .....	I-3
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis .....	II-1
B. Perjanjian Kinerja .....	II-4
C. Pengukuran Kinerja .....	II-7
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja .....	III-1
B. Evaluasi dan Analisis .....	III-14
C. Efisiensi .....	III-48
D. Akuntabilitas Keuangan .....	III-48
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan .....	IV-1
B. Rekomendasi .....	IV-2



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Penanganan Pelanggaran merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Direktorat Penanganan Pelanggaran adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta koordinasi, evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran.

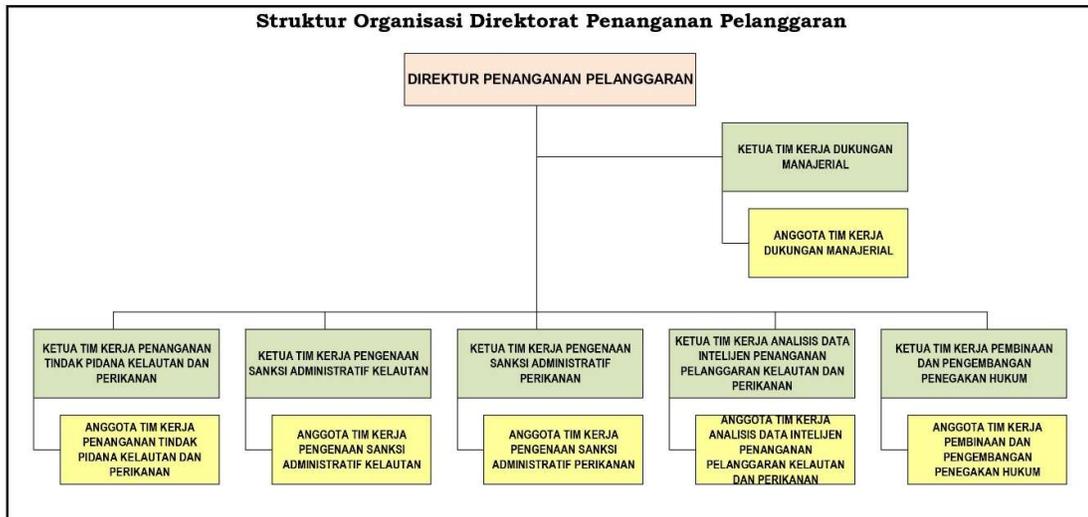
Dalam rangka pelaksanaan tugas yang diamanatkan, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;

- a. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, pengenaan sanksi administratif, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, pengenaan sanksi administratif, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut; dan Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Berikut struktur organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Penanganan Pelanggaran didukung oleh 34 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat pejabat eselon II sampai dengan pelaksana/staf. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 orang Pejabat Eselon II, 4 orang Pengawas Perikanan Ahli Madya, 6 orang Pengawas Perikanan Ahli Muda, 3 orang Analis Hukum Ahli Muda, 1 orang Analis Hukum Ahli Pertama, 1 orang Analis PKAPBN Ahli Muda, 1 orang Arsiparis Terampil, 1 orang Pranata SDMA Terampil, dan 18 Jabatan Fungsional Umum.

## B. ISU STRATEGIS

Isu strategis kegiatan penanganan pelanggaran antara lain:

1. Penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebagai perwujudan *restoratif justice*;
2. Penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir atau ultimum remidium dalam penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan yang dikenakan terhadap pelanggaran yang menimbulkan dampak bagi keselamatan, kesehatan, dan kerusakan lingkungan;
3. Penanganan nelayan pelintas batas;
4. Peningkatan kapasitas PPNS kelautan dan perikanan serta penguatan dan sinergitas kerjasama penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

## **C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA**

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Pelanggaran.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan kinerja dan apa saja Perjanjian Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2023.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2023.

### **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

---

### A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Direktorat Penanganan Pelanggaran tidak membuat Rencana Strategis (Renstra) secara khusus, akan tetapi menjadikan Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024 sebagai renstra bersama di lingkup Ditjen PSDKP. Renstra tersebut merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

**“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”**

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu,

beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

**Misi :**

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang selaras dengan tujuan KKP tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tujuan dan Sasaran:**

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel II.1.

Tabel II. 1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

### 3. Indikator Kinerja Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program KKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan program generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan program teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan

pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel II.2.

Tabel II.2. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat					
	<i>Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)</i>	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat					
	<i>Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</i>	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif					
	<i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)</i>	54,18	60	65	70	75
	<i>Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)</i>	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas					
	<i>Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)</i>	93	93	93	93	93
<b>Program: Dukungan Manajemen</b>						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP					
	<i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	30	31	32	33	34
	<i>Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)</i>	4	5	6	7	8
	<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)</i>	72	73	74	75	76
	<i>Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)</i>	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)</i>	3	3	3	3	3
	<i>Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	82	84	86	88	90
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)</i>	60	65	70	75	80
	<i>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)</i>	88	89	89	90	90
	<i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan itikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu 1 tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; dan <sup>(3)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Direktorat Penanganan Pelanggaran telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 awal telah ditetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Kemudian pada triwulan IV tahun 2023, perjanjian kinerja mengalami perubahan dengan 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Perubahan ini seiring dengan perubahan struktur organisasi dalam badan KKP menjadi kelompok tim kerja. Perubahan perjanjian kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II.3. Perubahan Perjanjian Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2023

No.	Perjanjian Kinerja awal	No.	Perjanjian Kinerja perubahan
<i>Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya penyadartahuan nelayan yang efektif untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal</i>		<i>Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal</i>	
1	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain secara Ilegal 73	1	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal 73
<i>Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas</i>		<i>Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas</i>	
2	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 93	2	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan 80
3	Indeks Kualitas Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 70	3	Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif 80
		4	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 80
		5	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 80
		6	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif 80
<i>Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan</i>		<i>Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas</i>	
4	Persentase Pengenaan Sanksi Adminstratif Bidang Kelautan dan Perikanan 80	7	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 93

No.	Perjanjian Kinerja awal	No.	Perjanjian Kinerja perubahan
5	Persentase Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif 80	8	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 70
		9	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain 70
		10	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan 100
		11	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 100
		12	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 77
		13	Jumlah Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 1
	<i>Sasaran Kegiatan 4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>		<i>Sasaran Kegiatan 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP</i>
6	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 100	14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 100
7	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 100	15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 78
8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 78	16	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 80,5
9	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 77	17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan 75
10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 90	18	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PP 99
11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan 75	19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja 21

No.	Perjanjian Kinerja awal	No.	Perjanjian Kinerja perubahan
12	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja 21	20	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 92
13	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 1	21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 77,5
14	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 92	22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 77,5
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 77,5		
16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran 77,5		

Pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut didukung dengan alokasi anggaran yang beberapa kali memiliki perubahan dikarenakan terdapat kebijakan *Automatic Adjustment (AA)* yang ditabulasikan, sebagai berikut.

Tabel II.4. Kebijakan *Automatic Adjustment (AA)* Anggaran Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

NO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN SEMULA (Rp)	ANGGARAN MENJADI PASCA (AA) (Rp)
<b>Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan</b>			
1.	Koordinasi	2.922.859.000	2.098.108.000
2.	Normas, Standard, Prosedur, dan Kriteria	150.000.000	150.000.000
3.	Penanganan Perkara	306.050.000	212.050.000
4.	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	743.000.000	510.750.000
5.	Pemantauan Produk	2.746.491.000	2.494.764.000
<b>TOTAL</b>		<b>6.868.400.000</b>	<b>5.465.672.000</b>

### C. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dengan melakukan pengukuran dan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan ke dalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id> dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja dalam aplikasi **Kinerjaku** adalah sebagai berikut.

					
Istimewa Nilai 110 - 120	Baik Nilai 90 - <110	Cukup Nilai 70 - <90	Kurang Nilai 50 - <70	Sangat kurang Nilai <50	Belum ada penilaian

Capaian kinerja hasil pengukuran akan dianalisis dan dibahas pada Bab III Laporan Kinerja.



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Direktorat Penanganan Pelanggaran memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja. Pencapaian atas sasaran kegiatan dan indikatornya dikomitmenkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Penanganan Pelanggaran dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 5.

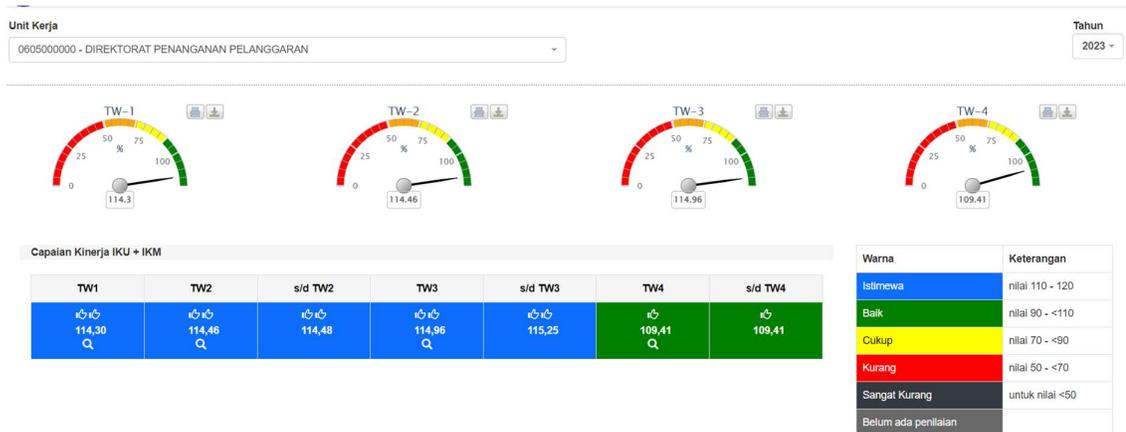
Nilai rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023 sebesar 109,41% yang diperoleh dari capaian Indikator Kinerja sebagaimana ditabulasikan pada tabel berikut.

Tabel III.1. Tabel target dan capaian indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
<b>SK 1. Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal</b>				
1	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal	73	85,7	117,4
<b>SK 2. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas</b>				
2	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	80	80	100
3	Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif	80	80	100
4	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	80	80	100
5	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	80	80	100

6	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	80	80	100
<b>SK 3. Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas</b>				
7	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93	92,86	99,85
8	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	70	94,81	120
9	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain	70	85,58	120
10	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100	100	100
11	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	100	100
12	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	77	89,61	116,38
13	Jumlah Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	1	1	100
<b>SK 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP</b>				
14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	100	100
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	78	87,85	112,63
16	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	80,5	84,1	104,47
17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	75	75	100
18	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PP	99	99,59	100,6
19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	26,51	120
20	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	92	105,97	115,18
21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	77,5	100	120
22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	77,5	100	120

Dan berikut tampilan pada aplikasi Kinerjaku setelah semua capaian pada tahun 2023 diinput data.



## B. EVALUASI DAN ANALISIS

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada 22 indikator kinerja pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran Kegiatan I "Terselenggaranya Penysadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal"**

### IKU 1. Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal

<b>SK.01</b>	<b>Terselenggaranya Penysadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal</b>					
<b>IK.01</b>	<b>Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
58,68	86,93	90,5	73	85,70	117,4	75

Capaian Indikator Kinerja nilai pemahaman nelayan untuk tidak melakukan penangkapan di negara lain tahun 2023 ini tercapai dengan nilai 85,70, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu nilai 73 (persentase capaian 117,4%). Capaian ini didapat berdasarkan hasil *post test* untuk nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melintas batas secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan efektif dan berhasil dalam meningkatkan pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas dan menangkap ikan di perairan negara lain. Metode kegiatan yang digunakan yaitu sosialisasi, edukasi, kampanye, dan diskusi interaktif melalui kuis dengan para nelayan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke dengan sasaran kegiatan 150 orang nelayan/keluarga nelayan/pemilik kapal/pemodal di wilayah Kabupaten Merauke. Pemberian pemahaman kepada nelayan di Kabupaten Merauke bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi para nelayan, keluarga nelayan, pemilik kapal dan/atau pemodal khususnya di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan agar tidak menangkap ikan di wilayah perairan negara lain tanpa izin.

Pada kegiatan penyadartahuan, juga dilakukan kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama oleh nelayan untuk tidak melintas batas dan menangkap ikan di wilayah negara lain, dan forum diskusi dengan para nelayan. Kesimpulan hasil diskusi dengan nelayan, antara lain:

- a) Nelayan Papua bagian selatan seringkali melintas batas di wilayah Selat Torres yang meliputi sebagian wilayah perairan Papua Nugini dan Australia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.
- b) Nelayan yang melintas batas ke wilayah Papua Nugini melanggar ketentuan UU Perikanan, UU Imigrasi dan UU Kepabebean dengan ancaman pidana penjara 1-3 tahun dan denda kurang lebih 200 juta rupiah.
- c) Dengan adanya nelayan yang tertangkap di Negara lain, khususnya Papua Nugini, tidak hanya merugikan para nelayan, tetapi juga merugikan Negara Indonesia di mata Internasional.
- d) Bentuk perlindungan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri berupa pendampingan, mediasi advokasi, kunjungan ke penjara, bantuan logistik dan Repatriasi/Pemulangan Nelayan.

Saran untuk kegiatan pemberian pemahaman nelayan, yaitu:

- a) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke memberikan masukan agar kiranya ada tindak lanjut program/kegiatan yang dilakukan oleh KKP setelah pelaksanaan kegiatan pemberian pemahaman kepada nelayan agar proses edukasi dan implementasinya tidak terputus. Untuk itu Ditjen PSDKP hendaknya dapat menggandeng unit Eselon lainnya di lingkup KKP untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kehidupan dan memberi nilai tambah secara ekonomi kepada para nelayan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- b) Hal lain yang juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pengawasan di wilayah Merauke adalah perlunya inisiasi dan dukungan dari KKP agar Pos Lintas Batas

Laut di perairan Torasi bersama dengan aparat penegak hukum lainnya dapat segera direalisasikan.

- c) Peningkatan status kelembagaan Satwas PSDKP Merauke menjadi Stasiun/Pangkalan PSDKP mengingat wilayah Merauke juga telah ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan. Dengan peningkatan status kelembagaan tersebut, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga dapat meningkat dan menjangkau hingga daerah-daerah lain secara lebih luas, seperti daerah Kombe yang saat ini statusnya telah menjadi Pelabuhan Perikanan.
- d) Satwas PSDKP Merauke maupun Dinas Perikanan Provinsi dan Kabupaten berharap ada pelatihan untuk meningkatkan SDM di wilayah mereka.

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, capaian indikator kinerja nilai penyadartahuan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023 Direktorat PP menempati urutan kedua di antara unit kerja Direktorat PPSDP dan Direktorat PPSDK.



Adapun alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kegiatan ini adalah sebesar Rp328.950.000,00 dengan realisasi anggaran Rp327.312.520,00 atau 99,87%. Nilai capaian indikator kegiatan dan realisasi anggaran yang dicapai menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan dengan efisien.

**Sasaran Kegiatan II " Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas"**

**IKU 2. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan**

SK.02	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas					
IK.02	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan					
Realisasi tahun 2020-2022			Tahun 2023			RENSTRA 2024
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% thd tahun 2023	T
-	-	-	80	80,00	100	80

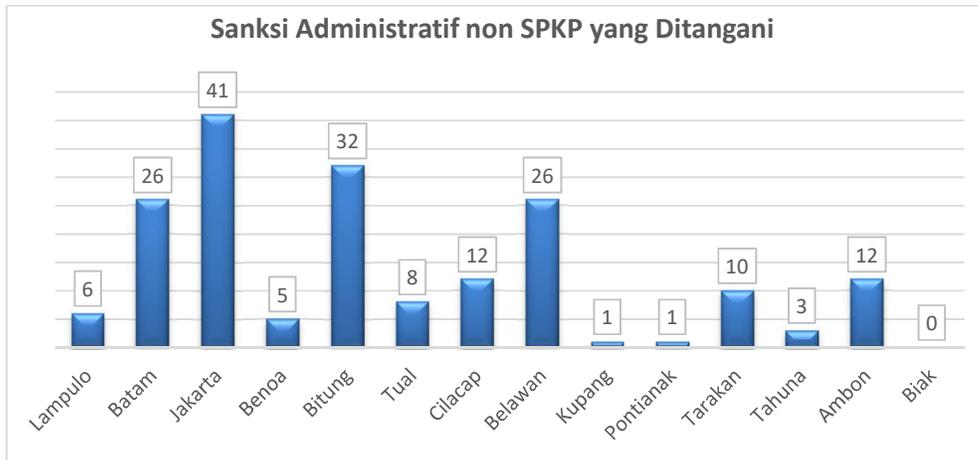
Capaian indikator kinerja nilai indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan tahun 2023 adalah 80 dari target yang ditetapkan sebesar nilai 80 (persentase capaian 100%). Nilai ini diperoleh berdasarkan kriteria nilai indeks dari penghitungan persentase dimana persentase penghitungan diperoleh dari jumlah sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang sudah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total kasus pelanggaran sanksi administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose. Output dari tindak lanjut tersebut berupa draft penetapan pengenaan sanksi (draft SP2, draft rekomendasi pencabutan/pembekuan izin, draft denda sanksi administratif).

Jumlah pengenaan sanksi administratif non SPKP berupa draft penetapan denda administratif pada tahun 2023 ini sebanyak 183 pelanggaran sehingga didapat capaian sebesar 100%. Berdasarkan manual IKU capaian sebesar 100% masuk dalam nilai indeks 80 atau kriteria "Baik".

Tabel III.2. Tabel kriteria penilaian indeks kinerja kegiatan penanganan pelanggaran tahun 2023

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	60	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Rincian jumlah kasus pelanggaran non SPKP per UPT yang menangani sepanjang tahun 2023 digambarkan dalam grafik berikut.



Tercapainya kinerja ini sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan oleh keberhasilan para pihak terkait ekspose kasus pelanggaran sanksi administratif non SPKP dalam menindaklanjuti dengan tuntas.

Dilihat dari tabel perbandingan di atas, indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru untuk level II pada tahun 2023. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp106.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp105.839.149,00 atau 99,85%.

### IKU 3. Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif

<b>SK.02</b>	<b>Terseleenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas</b>					
<b>IK.03</b>	<b>Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
-	-	-	80	80	100	80

Indikator kinerja indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif (non SPKP) merupakan pengukuran tingkat kesesuaian proses sanksi administratif dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh UPT PSDKP sebelum adanya penetapan sanksi administratif yang direpresentasikan melalui mekanisme ekspose.

Perolehan nilai capaian indeks sebesar 80 dari target capaian nilai 80 (persentase capaian 100%) pada indikator kinerja ini berdasarkan tabel kriteria indeks dari hasil persentase

perbandingan jumlah pengenaan sanksi administratif dibandingkan dengan total kasus pelanggaran yang direkomendasikan dikenakan sanksi administratif. Total kasus pelanggaran yang direkomendasikan pengenaan sanksi administrasi kurun waktu tahun 2024 sebanyak 183 kasus, dengan rincian 180 kasus dikenakan denda sanksi dan 3 kasus rekomendasi pembekuan izin. Nilai persentase capain indikator kinerja sebesar 100% masuk dalam kriteria “Baik” dengan nilai indeks 80 (tabel III.2).

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sanksi administratif, Direktorat Penanganan Pelanggaran menggunakan pengisian form evaluasi kesesuaian penerapan sanksi administratif dalam penerapan pasal pada saat ekspose. Faktor utama keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah kemampuan SDM yang memutuskan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

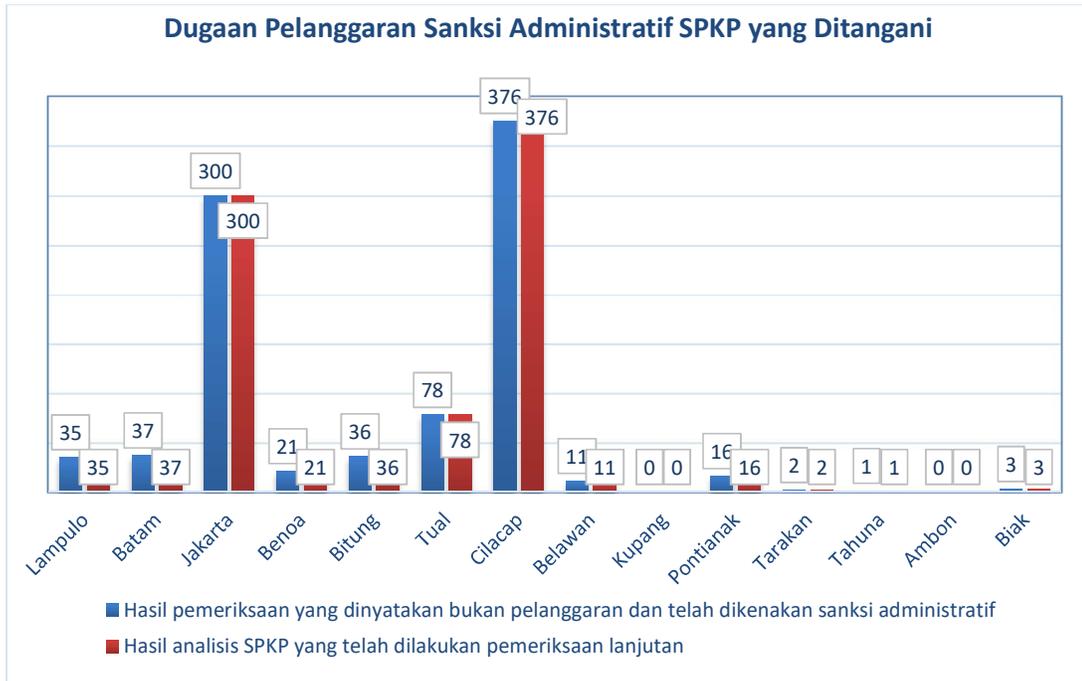
#### **IKU 4. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Indeks tindak lanjut analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan kapal/pelaku usaha, dimana diperoleh dari jumlah hasil pemeriksaan yang dinyatakan bukan pelanggaran dan telah dikenakan sanksi administratif dibanding dengan jumlah hasil analisa SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan berjalan.

<b>SK.02</b>	<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas</b>					
<b>IK.04</b>	<b>Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
-	-	-	80	80	100	80

Periode tahun 2024, jumlah kasus dugaan pelanggaran SPKP sebanyak 1.184 kasus, terdiri dari 916 kasus sudah ditindaklanjuti dan 268 masih dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 916 kasus yang sudah ditindaklanjuti inilah sebagai capaian tindak lanjut dari hasil analisis pemantauan (916 pelanggaran/916 pelanggaran). Nilai persentase capain indikator kinerja sebesar 100% masuk dalam kriteria nilai indeks 80 (tabel III.2).

Rincian data dugaan pelanggaran SPKP per UPT yang menangani tahun 2023 digambarkan pada grafik berikut.



Faktor utama keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah kemampuan PPNS Perikanan dalam SDM menganalisis kasus sanksi administratif yang sudah ditindaklanjuti prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**IKU 5. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan**

<b>SK.02</b>	<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas</b>					
<b>IK.05</b>	<b>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
-	-	-	80	80	100	80

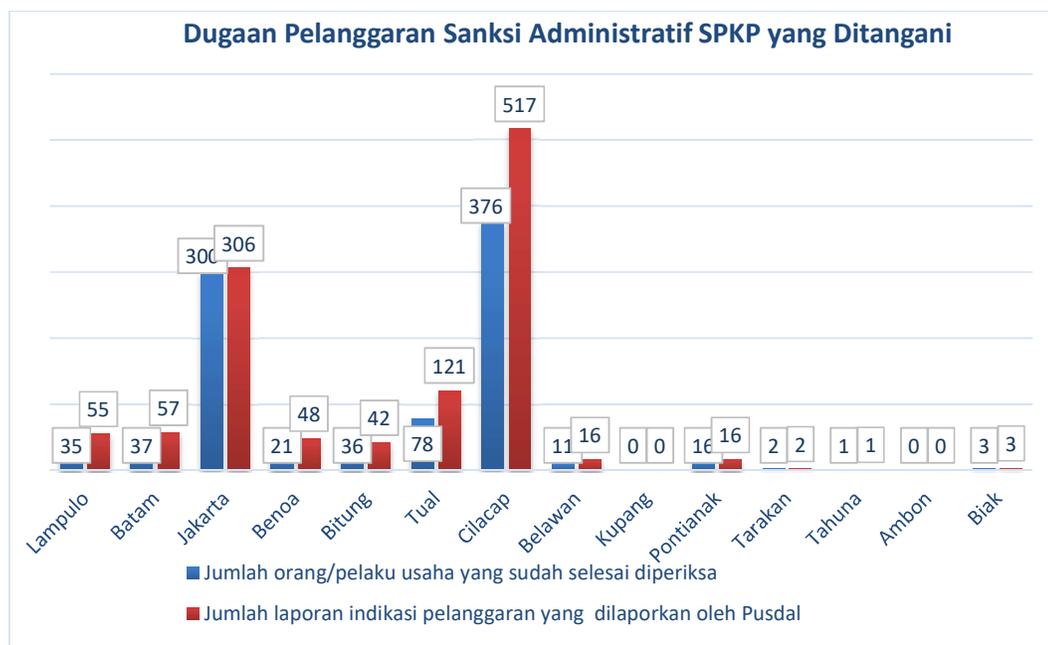
Indikator kinerja pemeriksaan hasil analisa SPKP masih merupakan rangkaian dari indikator kinerja sebelumnya. Dari jumlah kasus dugaan pelanggaran SPKP sebanyak 1.184 kasus,

sebanyak 916 kasus sudah selesai diperiksa sehingga didapat nilai 77,36%. Nilai persentase capaian sebesar 77,36% masuk dalam kriteria nilai indeks 80 atau kriteria “Baik” (tabel III.2).

Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Faktor utama keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah kemampuan sumber daya PPNS Perikanan dalam menganalisis kasus sanksi administratif yang sudah ditindaklanjuti prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Rincian data pemeriksaan dugaan pelanggaran sanksi administrasi SPKP per UPT tahun 2023 yang menangani dapat dilihat dalam grafik berikut.



Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

#### **IKU 6. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif**

Penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif merupakan tingkat pencapaian kinerja supervisi/monev/permohonan penerbitan billing denda administratif dan rekomendasi pembukuan/pencabutan perizinan berusaha. Sebanyak 183 kasus pelanggaran non SPKP, sebanyak 183 pula telah tuntas ditindaklanjuti dalam permohonan penerbitan billing denda administratif. Sehingga didapat capaian sebesar 100% dimana

masuk dalam tabel kriteria nilai indeks 80 atau kriteria "Baik". Output dari indikator kinerja berikut berupa surat surat penetapan denda/nota dinas surat rekomendasi denda dan surat penerbitan billing pembayaran sanksi administratif.

SK.02	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas					
IK.06	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Peneanaan Sanksi Administratif					
Realisasi tahun 2020-2022			Tahun 2023			RENSTRA 2024
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% thd tahun 2023	T
-	-	-	80	80	100	80

Faktor pendukung tercapainya kinerja penyelesaian tindak lanjut peneanaan sanksi administratif disebabkan oleh koordinasi yang baik dengan eselon I lain dan ketaatan pelaku usaha membayar denda sanksi administratif.

Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

*Sasaran Kegiatan III " Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas"*

**IKU 7. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan**

SK.03	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas					
IK.07	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan					
Realisasi tahun 2020-2022			Tahun 2023			RENSTRA 2024
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% thd tahun 2023	T
94,05	100	-	93	92,86	99,85	93

Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari kasus selesai yaitu berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21), dan/atau barang bukti dan tersangka yang telah dilimpahkan dari Penyidik kepada ke Jaksa (Penyerahan Tahap II).

Berdasarkan kasus yang ditangani, capaian indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sebesar 92,86 dari target 93 (persentase capaian 99,85%). Nilai capaian ini diperoleh berdasarkan kasus proses yang diproses hukum sebanyak 56 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan dengan jumlah kasus yang telah selesai 52 kasus. Data kasus tindak pidana kelautan dan perikanan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Data kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang diproses hukum tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	TPP / TPK
1	Batam	9	9	9 kasus TPP
2	Lampulo	6	4	2 kasus TPP 4 kasus TPK
3	Bitung	17	17	6 kasus TPP 11 kasus TPK
4	Cilacap	2	2	2 kasus TPP
5	Tahuna	4	4	2 kasus TPP 2 kasus TPK
6	Tarakan	7	5	4 kasus TPP 3 kasus TPK
7	Belawan	8	8	8 kasus TPP
8	Pontianak	3	3	1 kasus TPP 2 kasus TPK
	<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	

Penanganan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada tahun 2023, penanganan kasus terbanyak terjadi di wilayah Pangkalan PSDKP Bitung. Di dalam penanganan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung lebih banyak tindak pidana kelautan yang menggunakan bahan peledak (*destructive fishing*) dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Tercapainya kinerja ini disebabkan oleh keberhasilan PPNS Perikanan Ditjen PSDKP dalam menyelesaikan proses hukum tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pelaksanaan supervisi dan monitoring evaluasi perkembangan kasus juga sangat mendukung keberhasilan tersebut.

**IKU 8. Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan**

SK.03	Terseleenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas					
IK.08	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan					
Realisasi tahun 2020-2022			Tahun 2023			RENSTRA 2024
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% thd tahun 2023	T
-	-	92,42	70	94,81	120	70

Capaian indikator kinerja indeks kualitas supervisi/monitoring dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan pada tahun 2023 tercapai sebesar 94,81 dari target sebesar 70 (persentase capaian 120%). Capaian ini diperoleh dari 3 komponen pembentuk yaitu persentase supervisi penyidikan (P1), persentase supervisi penanganan barang bukti (P2), dan persentase supervisi penanganan awak kapal (P3).

	P1	P2	P3	
Nilai	96,43	99,17	87,20	
Bobot	50%	25%	25%	
Total	48,21	24,79	21,80	94,81

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2020 – 2023 perbedaan satuan indikator yaitu persentase dengan indeks serta perbedaan status dimana pada tahun 2021 supervisi penanganan pelanggaran muncul sebagai indikator kinerja sedangkan di tahun 2022 supervisi penanganan pelanggaran dihitung sebagai komponen pembentuk indikator kinerja.

Capaian indikator kinerja indeks kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari 3 komponen pembentuk yaitu supervisi penyidikan, supervisi penanganan barang bukti, dan supervisi penanganan awak kapal.

**a) Supervisi penyidikan**

Kegiatan supervisi penyidikan merupakan proses penyidikan terhadap kasus yang belum terselesaikan atau belum P21/penyerahan tahap II. Supervisi dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan, memastikan proses penyidikan sesuai dengan juknis penyidikan TPKP, dan mendukung percepatan penanganan kasus TPKP. Nilai persentase supervisi penyidikan diukur melalui persentase total kasus yang

disupervisi berbanding dengan total kasus yang ditangani. Kasus yang mampu dilakukan supervisi sebanyak 54 kasus dari total 56 kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan dengan rincian tindak pidana perikanan 34 kasus dan kelautan 20 kasus. Lokasi supervisi disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.3. Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang telah disupervisi pada tahun 2023

JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH KASUS DISUPERVISI	KASUS MASUK	PERSENTASE SUPERVISI PENYIDIKAN
Tindak Pidana Kelautan	20	22	90,91
Tindak Pidana Perikanan	34	34	100
<b>Rata-rata</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>96,43</b>

Tabel III.4. Lokasi supervisi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan tahun 2023

NO	NAMA TERSANGKA	LOKASI SUPERVISI	TAHAPAN PROSES HUKUM
1	Khon Kheang	Stasiun PSDKP Belawan	Inkracht
2	Sugijo Nurofik	Satwas SDKP Pati	Inkracht
3	Riza Garnita	Satwas SDKP Pati	Inkracht
4	Glen Artur Sanotan	Pangkalan PSDKP Bitung	Inkracht
5	Zaw Tun	Pangkalan PSDKP Batam	Inkracht
6	Nguyen Van Bay	Satwas SDKP Anambas	Inkracht
7	Edgardo Cabarrubias	Pangkalan PSDKP Bitung	Inkracht
8	Harim P. Salmoro	Pangkalan PSDKP Bitung	Inkracht
9	Angelo Santiago Angalan	Pangkalan PSDKP Bitung	Inkracht
10	Wendel Amores	Pangkalan PSDKP Bitung	Inkracht
11	Moktar K. Hambali	Pangkalan PSDKP Bitung	Inkracht
12	Muzakir	Pangkalan PSDKP Lampulo	Inkracht
13	Jalaluddin M. Jafar	Pangkalan PSDKP Lampulo	Inkracht
14	Somsak Prombut	Stasiun PSDKP Belawan	Inkracht
15	Than Htike	Wilker PSDKP Dumai	Inkracht
16	Anai	Satwas SDKP Langsa	Banding
17	Sulaiman	Stasiun PSDKP Pontianak	Inkracht
18	Tran Mua	Pangkalan PSDKP Batam	Tahap II
19	Hermansyah Siahaan	Wilker PSDKP Dumai	Inkracht
20	Husni	Wilker PSDKP Dumai	Inkracht
21	Tun Shien	Stasiun PSDKP Belawan	Inkracht
22	Tandy Toun	Pangkalan PSDKP Batam	Inkracht

NO	NAMA TERSANGKA	LOKASI SUPERVISI	TAHAPAN PROSES HUKUM
23	Le Minh Soan	Pangkalan PSDKP Batam	Inkracht
24	Nguyen Thanh Xuan	Pangkalan PSDKP Batam	Inkracht
25	Pratama Panjaitan	Stasiun PSDKP Belawan	Inkracht
26	Eric Makizi Cabca	Stasiun PSDKP Tahuna	Inkracht
27	Ha Van Khoi	Pangkalan PSDKP Batam	Tahap II
28	Dang Van Binh	Pangkalan PSDKP Batam	Tahap II
29	Ramil Allera	Stasiun PSDKP Tahuna	P-21
30	Hairuddin bin Idrus	Satwas SDKP Kotabaru	Kasasi
31	Baharuddin bin H. Duhaling	Satwas SDKP Kotabaru	Inkracht
32	Nguyen Hoang Giau	Pangkalan PSDKP Batam	Inkracht
33	Eko Andi Novianto	Satwas SDKP Kotabaru	Inkracht
34	Rizza Fitrianto	Satwas SDKP Kotabaru	Inkracht
35	Parto Bin Juhaepa dan Ilma bin Jamaludin	Wilker PSDKP Luwuk	Inkracht
36	Juhaepa bin Abe	Wilker PSDKP Luwuk	Inkracht
37	Husban bin Alidua	Wilker PSDKP Morowali	Inkracht
38	Mirdan bin Hajirin	Wilker PSDKP Morowali	Inkracht
39	Mustamin bin POA	Wilker PSDKP Morowali	Inkracht
40	Jamil bin Jabir	Wilker PSDKP Morowali	Inkracht
41	Hasdin bin Labacu	Wilker PSDKP Morowali	Inkracht
42	Asnal Buhari bin	Wilker PSDKP Morowali	Inkracht
43	Rusli Ismail	Satwas SDKP Simeulue	Inkracht
44	Daifizal, Burhanuddin Nst, Edi Kandra, Foluzatulun Duha, Erik Adam Nst, Rudi Hartono, dan Arpan	Satwas SDKP Simeulue	Inkracht
45	Alan bin Uldi	Satwas SDKP Ketapang	Inkracht
46	Toni bin Mohtar	Stasiun PSDKP Pontianak	P-21
47	Otong bin Baltafa	Stasiun PSDKP Tarakan	P-21
48	Julshiti bin Otong	Stasiun PSDKP Tarakan	Penyidikan
49	Sulaiman bin Jumairi	Stasiun PSDKP Tarakan	Penyidikan
50	Unihk	Pangkalan PSDKP Bitung	Kasasi
51	Rusli	Pangkalan PSDKP Bitung	Inkracht
52	Suardin	Pangkalan PSDKP Bitung	Inkracht
53	Sanusi	Pangkalan PSDKP Lampulo	Inkracht
54	Ruslan, Mahfud, dan Safrani	Pangkalan PSDKP Lampulo	Inkracht

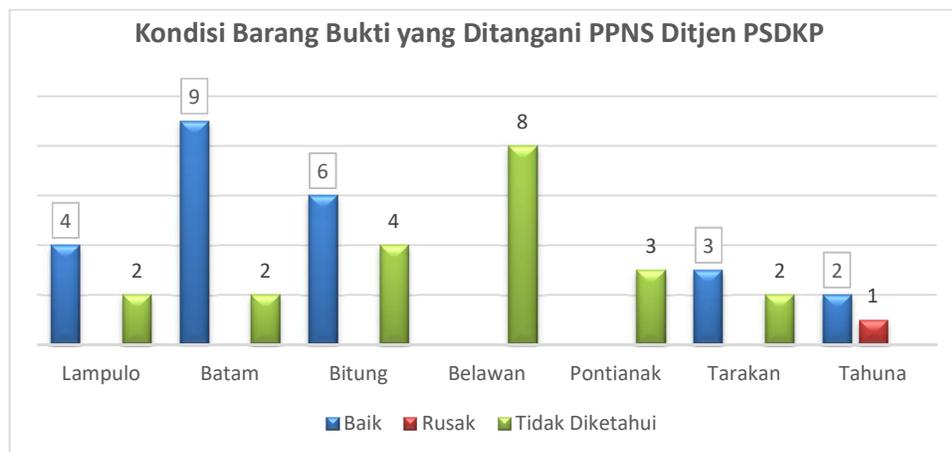
**b) Supervisi penanganan barang bukti**

Kegiatan supervisi penanganan barang bukti dilaksanakan di 7 lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan barang bukti dalam

pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada Penuntut Umum (P21 Tahap II).

Supervisi penanganan barang bukti diperoleh dari nilai bobot tahapan ketika melaksanakan supervisi penanganan barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani. Tahapan dimulai dari persiapan data, analisa lokasi supervisi, pelaksanaan supervisi, dan pelaporan. Berdasarkan data rekapitulasi data barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama tahun 2023 yaitu sebanyak 42 unit barang bukti diperoleh nilai 99,17%.

Kondisi barang bukti 42 unit terbagi dalam 24 unit kondisi Baik, 1 unit kondisi rusak, dan 17 unit tidak diketahui (dalam penguasaan pemilik). Rincian jumlah dan kondisi barang bukti dapat dilihat pada grafik berikut.



**c) *Supervisi penanganan awak kapal***

Sama halnya dengan supervisi penanganan barang bukti, supervisi penanganan awak kapal juga diperoleh berdasarkan bobot tahapan pelaksanaan supervisi. Supervisi penanganan awak kapal kurun tahun 2023 dilaksanakan di 7 lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan awak kapal atau pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang terdiri dari tersangka, saksi, dan non justitia (non tersangka).

Dalam perkara pidana tindak pidana kelautan dan perikanan, bisa terdapat lebih dari 1 orang pelaku, tergantung dari kapasitas dan peran awak kapal. Hukum acara pidana di Indonesia, menghendaki penanganan para pelaku tindak pidana selaras dengan hak

asasi manusia yang norma hukumnya diakui secara internasional. Selain itu, terdapat rantai birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Perikanan terkait dengan pemulangan dan penanganan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang tidak dijadikan tersangka (*non justitia*) yang mana penanganannya dilakukan oleh kementerian yang membidangi keimigrasian, yakni Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan data rekapitulasi data awak kapal yang ditangani oleh PPNS Perikanan di UPT lingkup Ditjen PSDKP sebanyak 270 awak kapal diperoleh capaian sebesar 87,20%. Rincian 270 awak kapal yang ditangani :

Status Awak Kapal	Jumlah
Tersangka	66
Saksi	69
Non justitia	135
<b>Total</b>	<b>270</b>

Tabel III.5. Rekapitulasi penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan tahun 2023

No	UPT yang Menangani	Jumlah Kasus	Jumlah Awak Kapal yang Ditangani	Warga Negara
1	Lampulo	14	27	27 WNI
2	Batam	9	101	1 warga negara Laos 100 warga negara Vietnam
3	Bitung	17	35	13 warga negara Filipina 22 WNI
4	Belawan	8	37	15 warga negara Myanmar 4 warga negara Kamboja 5 warga negara Thailand 13 WNI
5	Pontianak	3	5	5 WNI
6	Tahuna	7	21	5 orang WNI 16 warga negara Filipina
7	Tarakan	7	44	3 warga negara Malaysia
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>270</b>	

**IKU 9. Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain**

SK.03	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas					
IK.09	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain					
Realisasi tahun 2020-2022			Tahun 2023			RENSTRA 2024
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% thd tahun 2023	T
-	-	-	70	85,58	120	

Indikator kinerja indeks sinergi penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan forum tindak pidana kelautan dan perikanan di tingkat pusat dan pelaksanaan integrasi data tindak pidana kelautan dan perikanan nasional.

Pengukuran indikator kinerja ini diperoleh dari rata-rata hasil kuesioner responden dari 2 kegiatan yang disebutkan di atas dengan nilai capaian 85,58 dari target 70 (persentase capaian 120).

No	Kegiatan	Jumlah Responden	Nilai Kuesioner
1	Forum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tingkat Pusat	75	87,3
2	Integrasi Data TPKP Nasional	23	83,85
Nilai rata-rata			85,58

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah koordinasi, dukungan, dan peran para aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan dalam penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan. Capaian indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya karena perbedaan satuan indikator dan formula penghitungan dalam salah satu komponen pembentuk.

**a) Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tingkat Pusat**

Forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan tingkat pusat dilaksanakan dengan pada tanggal 12 Desember 2023 di Hotel Discovery Hotel Ancol dengan jumlah peserta 75 orang yang berasal dari instansi/lembaga penegak hukum di

Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya sinergi persepsi antar pengawas kelautan dan perikanan serta aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan pusat dan daerah dalam mengawal kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Berdasarkan hasil kuesioner peserta forum koordinasi sebanyak 75 orang diperoleh nilai 87,31 dari 6 soal relevan terhadap materi yang disampaikan pada forum koordinasi.

**b) Integrasi Data TPKP Nasional**

Kegiatan Integrasi Data TPKP Nasional dihimpun dari data tindak kelautan dan perikanan yang ditangani. Pada awalnya Sinkronisasi dan Integrasi Data TPKP yang merupakan inisiasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan secara manual dan dikelola oleh 3 instansi yang melakukan penyidikan terhadap tindak kelautan dan perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perikanan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), TNI AL (Sopsal), dan POLRI (Dit. Polair Baharkam). Kemudian dari tahun 2019 – 2021 dalam perkembangannya berdasarkan kesepakatan dalam rangka menghimpun dan mengkoneksikan data penanganan TPKP yang komprehensif dari hulu ke hilir, menambah keanggotaan tim sehingga menjadi 6 instansi.

Berdasarkan hasil kuesioner anggota integrasi data TPKP Nasional sebanyak 23 orang diperoleh nilai 83,85 dari 7 pertanyaan yang relevan terhadap kegiatan integrasi data TPKP.

**IKU 10. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan**

<b>SK.03</b>	<b>Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas</b>					
<b>IK.10</b>	<b>Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
-	-	-	100	100	100	-

Intelijen penanganan pelanggaran merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk pengumpulan data dan informasi, analisis, dan penyampaian hasil analisis data berdasarkan tujuan yang ditetapkan sebagai bahan pengambilan keputusan dan/atau operasional penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Capaian sebesar 100% diperoleh dari tahapan dan penilaian penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran mengacu pada tabel :

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai tahapan	Output
1	persiapan	15	Surat tugas
2	pelaksanaan	70	Data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan/penyusupan/penjejukan/pulbaket yang berindikasi dengan pelanggaran di bidang kelaut dan perikanan
3	pelaporan	15	- laporan - infografis
	jumlah	100	-

Kegiatan utama indikator kinerja berikut adalah pelaksanaan rapat sinkronisasi data tindak pidana kelautan dan perikanan setiap bulan dengan menghasilkan infografis data TPKP yang sudah dianalisis. Data dukung output indikator kinerja berikut dapat diakses dalam drive [https://drive.google.com/drive/folders/1bn0qqCyp9jrI9YRjfaA\\_B9f1suOpSMLS](https://drive.google.com/drive/folders/1bn0qqCyp9jrI9YRjfaA_B9f1suOpSMLS).

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah konsisten dan komitmen UPT/daerah dalam melaporkan perkembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan. IKU 9 kegiatan penanganan pelanggaran merupakan indikator kinerja baru sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **IKU 11. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran**

Indikator kinerja persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1 draft, yaitu Revisi Peraturan Menteri Nomor 39/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin. Capaian indikator kinerja ini telah tercapai 100% pada triwulan II tahun 2023.

SK.03	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas					
IK.11	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran					
Realisasi tahun 2020-2022			Tahun 2023			RENSTRA 2024
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% thd tahun 2023	T
100	100	100	100	100,00	100	2

Rancangan Peraturan Menteri ini mengatur hal penting terkait koordinasi, informasi, pendataan, pemulangan nelayan Indonesia, kolaborasi pencegahan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dimana hal tersebut tidak diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin, sehingga dengan diundangkannya rancangan Peraturan Menteri dimaksud, maka Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Per tanggal 24 Juli 2023 Direktorat Penanganan Pelanggaran menyampaikan memo penyampaian Draft Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin draft naskah deskriptif dan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin, untuk dapat ditindaklanjuti dan segera disahkan guna menjadi acuan teknis pelaksanaan di lapangan.

Faktor keberhasilan capaian indikator kinerja ini salah satunya adalah skala prioritas menyempurnakan pedoman dalam penanganan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri sebagai tindakan komitmen terhadap pemberantasan IUU Fishing.

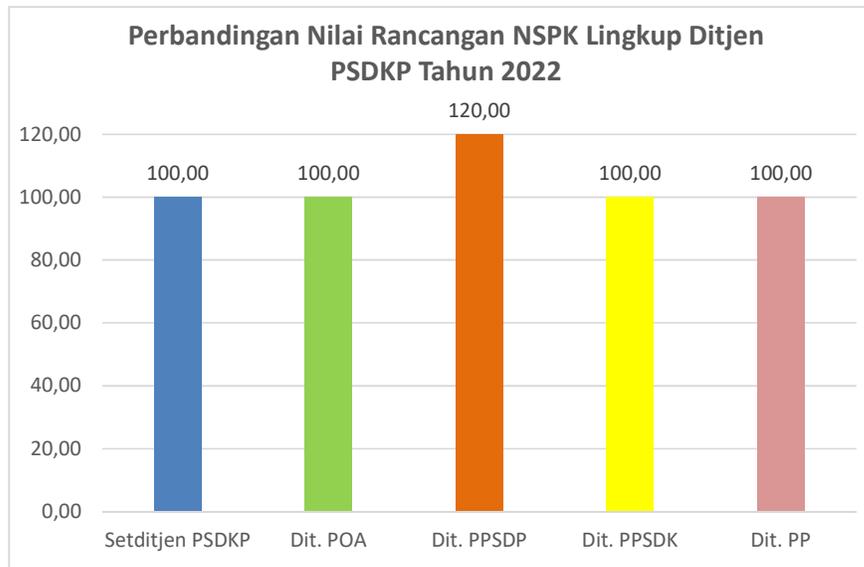
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENANGANAN NELAYAN INDONESIA  
YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI KARENA MELAKUKAN  
PENANGKAPAN IKAN DI NEGARA LAIN TANPA IZIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin, perlu mengatur penanganan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin;

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, capaian indikator kinerja persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP tahun 2023, seluruh Eselon II lingkup Ditjen PSDKP dapat mencapai indikator kinerja ini.



Adapun alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kegiatan ini adalah sebesar Rp150.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp123.699.460,00 atau 99,64%.

## IKU 12. Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

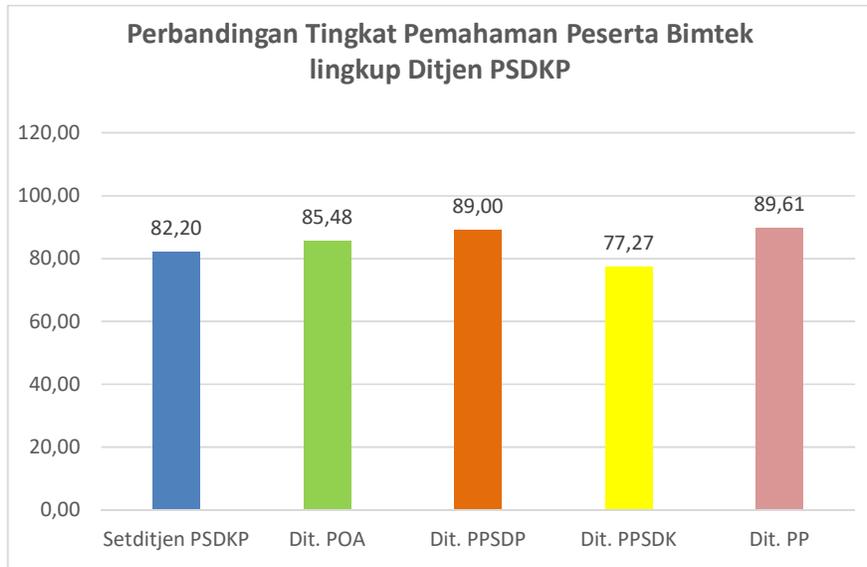
SK.03	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas					
IK.12	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran					
Realisasi tahun 2020-2022			Tahun 2023			RENSTRA 2024
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% thd tahun 2023	T
77,35	92,33	80,01	77	89,61	116,38	80

Capaian indikator kinerja tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023 sebesar 89,61 dari nilai yang ditargetkan sebesar 77 (persentase capaian 116,38). Capaian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana peserta bimtek dan pelatihan mengerti dan memahami materi yang disampaikan sehingga diasumsikan telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagaimana yang diharapkan dari pelaksanaan bimtek dan pelatihan.

Nilai ini diperoleh dari kegiatan utama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kelautan dan Perikanan (PPNS-KP) Tahun 2023 pada tanggal 21-23 Februari 2023 dengan peserta 53 orang. Bimtek ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada PPNS Perikanan terkait perubahan hukum acara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan yang ingin dicapai yaitu penyidikan yang dilakukan PPNS Perikanan terlaksana dengan tertib dan administrasi penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana guna menghindari praperadilan.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan bimtek untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman yang kemudian dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja.

Indikator kinerja ini juga terdapat di unit Eselon II lainnya. Perbandingan persentase capaian indikator kinerja pemahaman peserta bimtek bisa dilihat pada grafik berikut.



**IKU 13. Jumlah Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran**

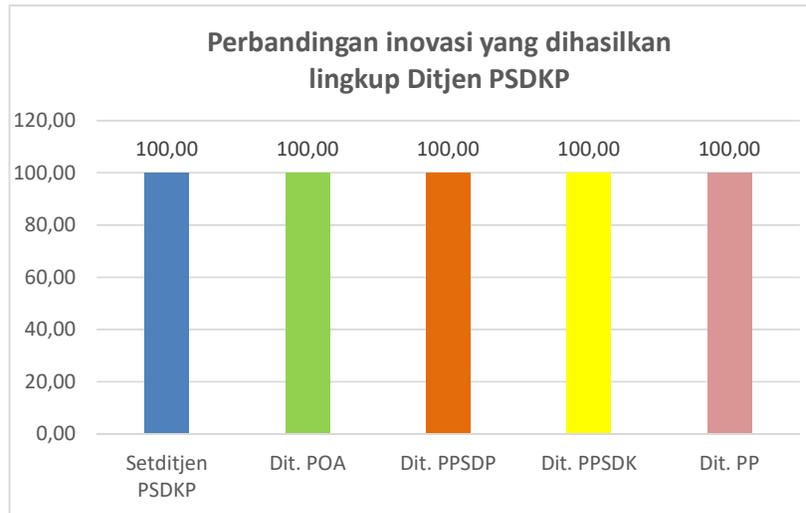
<b>SK.03</b>	<b>Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas</b>					
<b>IK.13</b>	<b>Jumlah Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
1	1	1	1	1,00	100,00	1

Inovasi gugus kerja transformasi Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023 mengusulkan tema Informasi dan Data Terpercaya Berbasis Digital. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kajian BPK dimana :

- (1) UPT Ditjen PSDKP belum sepenuhnya menggunakan form pelaporan yang ditetapkan dalam aturan.
- (2) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perikanan belum tepat waktu sehingga memerlukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pertukaran data dengan K/L lain (TNI AL dan POLRI) belum melalui website.

sehingga direkomendasikan agar membuat aplikasi laporan monev dan laporan penyidikan tindak pidana perikanan yang dapat dimanfaatkan pihak internal maupun eksternal.

Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran terealisasi 1 Inovasi (100%) dan dipresentasikan pada tanggal 14-15 Desember bersama antar Unit Eselon II lain dan UPT lingkup Ditjen PSDKP. Walaupun tidak menjadi juara, namun ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Penanganan Pelanggaran.



Faktor tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan adalah komitmen Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam peningkatan pelayanan berupa kemudahan mengakses dalam melaporkan atau pertukaran data untuk kebutuhan para stakeholder.

**Sasaran Kegiatan IV "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP"**

**IKU 14. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran**

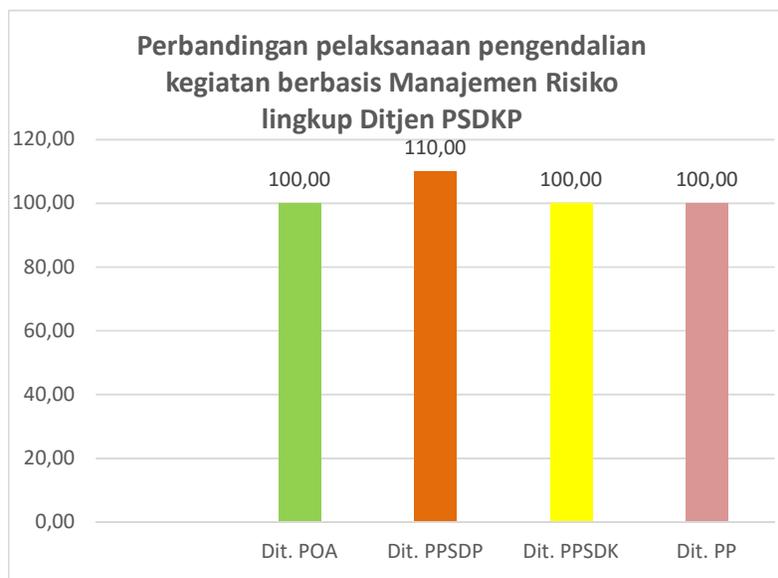
<b>SK.04</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</b>					
<b>IK.14</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
-	-	100	100	100	100	100

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dilakukan oleh pimpinan satuan kerja, dimana pimpinan satuan kerja melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Penilaian risiko dilakukan melalui form penilaian risiko sebagaimana tertuang dalam PermenKP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KKP. Pemantauan dan pengendalian manajemen risiko dilakukan dengan form pemantauan risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat nomor B.181/PSDKP.1/TU.210/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang “Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan IV TA. 2023 lingkup Ditjen PSDKP”. Pada surat tersebut tertera bahwa realisasi pengendalian risiko Direktorat Penanganan Pelanggaran tercapai 100% dan memiliki indikator warna hijau.

Kegiatan yang dilaksanakan mendukung indikator kinerja ini adalah penyampaian secara berkala dokumen kelengkapan pemantauan manajemen risiko Direktorat Penanganan Pelanggaran sebagai bahan penilaian SPIP Sekretaris Ditjen PSKDP. Dan faktor keberhasilan pencapaian risiko ini adalah komitmen untuk tepat waktu dan tuntas penyampaian dokumen data dukung.



## IKU 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
IK.15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran					
Realisasi tahun 2020-2022			Tahun 2023			RENSTRA 2024
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% thd tahun 2023	T
81,07	81,47	79,46	78	87,85	112,63	76

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi (bobot 25%), Kompetensi (bobot 40%), Kinerja (30%), dan Disiplin (5%) per masing-masing Pegawai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Capaian indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023 yaitu nilai 87,85 dari target nilai 78 (persentase capaian 112,63%). Capaian tersebut diperoleh dari 4 variabel berikut:

Aspek penilaian	Bobot	IP	%
Kualifikasi	25	21,65	86,6
Kompetensi	40	36,06	90,15
Kinerja	30	25,15	83,83
Disiplin	5	5	100
<b>IP ASN DIT. PP (38 Pegawai/ASN)</b>	<b>100</b>	<b>87,85</b>	<b>TINGGI</b>

Nilai capaian tahun 2023 Direktorat Penanganan Pelanggaran berada di atas target yang ditetapkan dengan kategori **Tinggi**. Capaian nilai ini meningkat dari tahun 3 tahun sebelumnya.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah peningkatan nilai kualifikasi dan kompetensi pegawai lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran. Nilai pada komponen kualifikasi meningkat 23,96% dari tahun 2022 yang dipengaruhi oleh bertambahnya pegawai yang memiliki peningkatan jenjang pendidikan. Sedangkan nilai pada komponen kompetensi juga meningkat sebesar 5,45% dari tahun 2022 yang dipengaruhi oleh diklat/seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya yang telah diikuti pegawai Direktorat Penanganan Pelanggaran. Nilai capaian IP ASN Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023 berarti menggambarkan semakin baiknya pengembangan profesionalitas ASN.

Nilai IP ASN Direktorat Penanganan Pelanggaran berada di posisi kedua setelah Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.



#### **IKU 16. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran**

Capaian nilai PM SAKIP tahun 2023 sebesar 84,10 dengan kategori penilaian A. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Kerja Program Sekretaris Ditjen PSDKP dan Inspektorat Jenderal KKP dan tertuang dalam memorandum Nomor 1336/PSDKP.1/TU.210/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 adalah 84,10 dari target 80,5 (persentase capaian 104,47). Penilaian dilakukan terhadap 4 komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

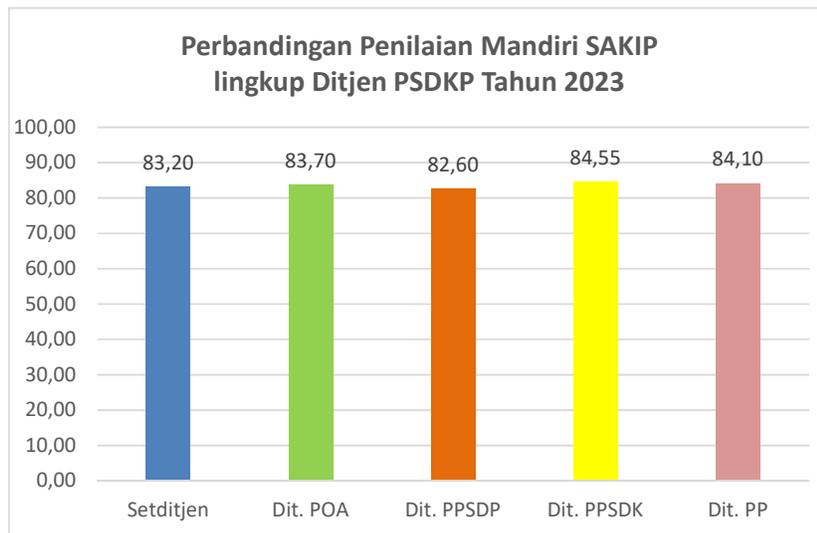
<b>SK.04</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</b>					
<b>IK.16</b>	<b>Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
-	-	-	80,5	84,10	104,47	

Penilaian SAKIP dilakukan rutin setiap tahun, namun baru di tahun ini muncul dalam indikator kinerja untuk Level II. Sehingga capaian indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja, telah dilakukan beberapa kegiatan utama, antara lain:

- a. Perencanaan kinerja. Dialog kinerja pimpinan lingkup Ditjen PSDKP, Rapat Kerja Teknis Pengawasan SDKP, Penyusunan rencana kerja 2023, Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja level 2, penyusunan manual IKU, pohon IKU, matriks cascading dari level 1 hingga ke level terbawah.
- b. Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 dan pengisian capaian aplikasi kinerjajaku, input data kinerja dan capaian triwulan I-IV tahun 2023 pada aplikasi kinerjajaku, pengisian ESR Kemenpan RB.
- c. Pelaporan Kinerja. Rekonsiliasi laporan kinerja tahun 2023 lingkup Ditjen. PSDKP, Penyusunan laporan kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Triwulan.
- d. Evaluasi SAKIP. Telah dilaksanakan Evaluasi Mandiri SAKIP level 1 oleh Inspektorat Jenderal PSDKP dan level 2 lingkup Ditjen PSDKP.

Perbandingan hasil penilaian mandiri antar level II lingkup Ditjen PSDKP digambarkan pada grafik berikut.



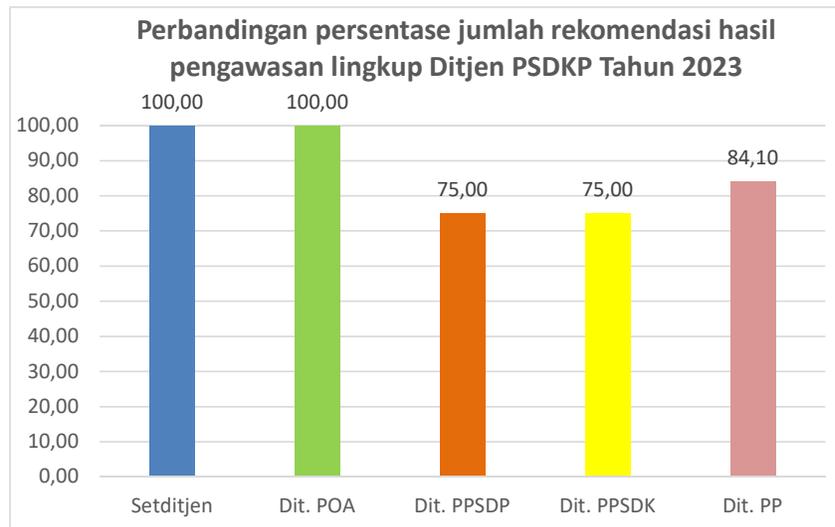
#### **IKU 17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan**

Capaian indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Penanganan Pelanggaran diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 – 30 September 2023 (triwulan IV tahun 2022 s.d. Triwulan III 2023) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit pelaksana sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023.

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
IK.17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan					
Realisasi tahun 2020-2022			Tahun 2023			RENSTRA 2024
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% thd tahun 2023	T
41,18	37,5	70	75	75,00	100,00	85

LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP Audit, reviu, dan evaluasi dalam bentuk surat dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Capaian rekomendasi lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat nomor B.157/PSDKP.1/TU.140/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penyampaian Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan IV Tahun 2023. Pada surat tersebut tertera tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran, sehingga capaian IKU poin ini memiliki indikator warna hijau atau persentase capaian sebesar 75% (sama dengan target) (persentase capaian 100%).

Perbandingan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan antar level II lingkup Ditjen PSDKP digambarkan pada grafik berikut.

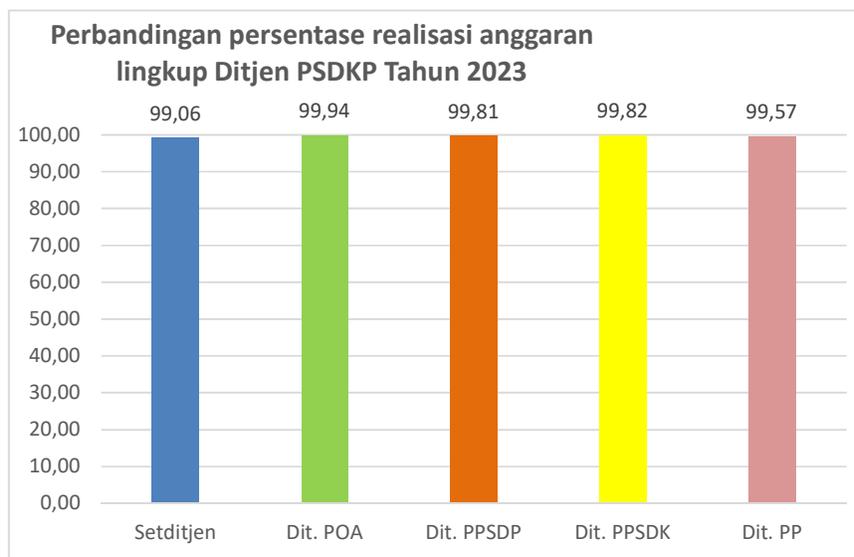


### IKU 18. Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

Pengukuran indikator kinerja persentase realisasi anggaran dilakukan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran suatu unit kerja. Direktorat Penanganan Pelanggaran telah mencapai realisasi anggaran sebesar 99,59% dari target sebesar 99% (persentase capaian 100,6) berdasarkan realisasi anggaran pada aplikasi SAKTI.

<b>SK.04</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</b>					
<b>IK.18</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PP (%)</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
-	-	-	99	99,59	100,60	99

Alokasi anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran sebesar Rp5.465.672.000,00 untuk melaksanakan dukungan program teknis. Dari alokasi tersebut, telah terealisasi anggaran sebesar Rp5.443.204.575,00 atau 99,59%. Tren persentase realisasi anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran ini menurun dari tahun sebelumnya. Penyebab faktor penurunan tren persentase tersebut adalah sisa anggaran belanja moda 53 yang tidak bisa digeser kea kun lain. Sehingga menyisakan anggaran yang cukup besar kurang lebih 0,42%. Perbandingan capaian realisasi anggaran antar Level II digambarkan pada grafik berikut.



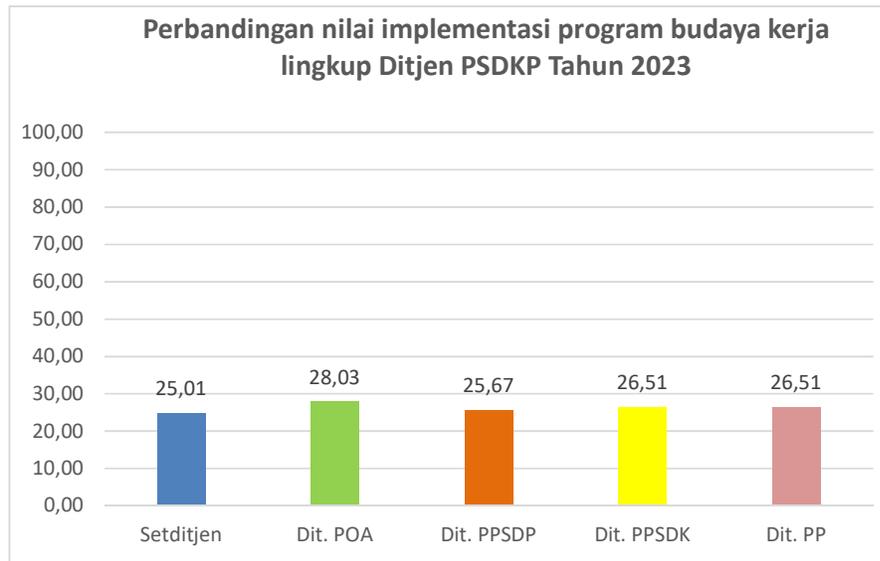
## IKU 19. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
IK.19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja					
Realisasi tahun 2020-2022			Tahun 2023			RENSTRA 2024
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% thd tahun 2023	T
-	-	24,86	21	26,51	120,00	-

Capaian indikator kinerja nilai implementasi program budaya kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran sebesar 26,51 dari target nilai 21 pada tahun 2023 (persentase capaian 120). Nilai ini diperoleh dari hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) penilaian mandiri Pelaksanaan Program Budaya Kerja Tahun 2023 lingkup Ditjen PSDKP.

Nilai implementasi budaya kerja mengindikasikan bahwa Direktorat Penanganan Pelanggaran sudah menerapkan pelaksanaan budaya kerja yang baik dalam rangka mewujudkan organisasi berdasarkan PILAR (Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif, Sinergi).

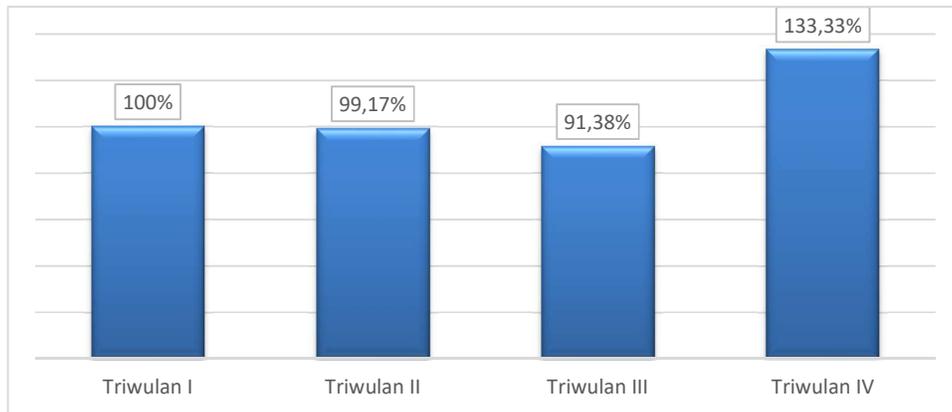
Perbandingan capaian indikator kinerja nilai implementasi program budaya kerja antar Level II digambarkan pada grafik berikut.



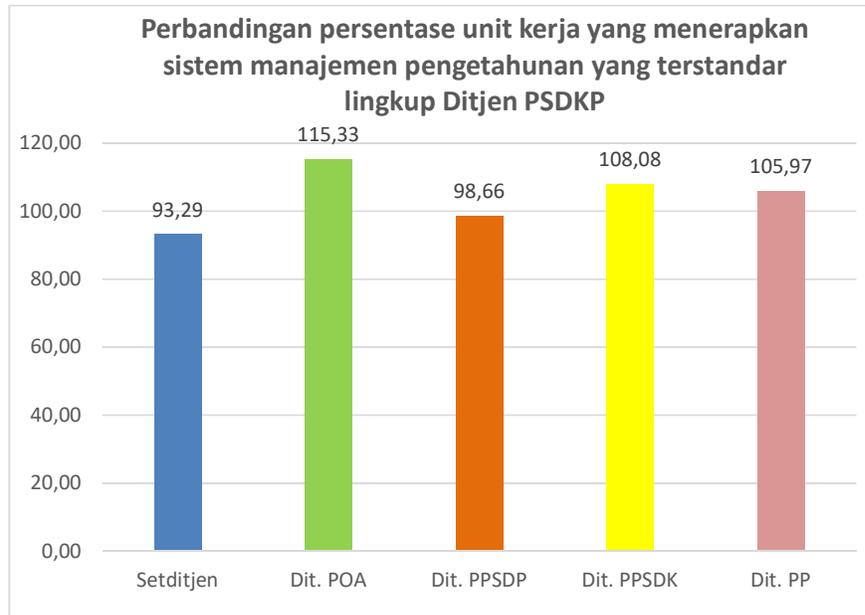
**IKU 20. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran**

<b>SK.04</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</b>					
<b>IK.20</b>	<b>Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
87,66	97,77	96,84	92	105,97	115,18	90

Capaian indikator kinerja persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran sebesar 105,97% diperoleh dari rata-rata dari 2 komponen yaitu pemenuhan dokumen dan keaktifan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi *collaboration office* melalui portal.kkp.go.id, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan. Capaian sebesar 105,97% diperoleh dari rata-rata capaian pada triwulan I – IV.



Capaian kinerja pada tahun 2023 ini menunjukkan tingginya partisipasi pegawai Direktorat Penanganan Pelanggaran untuk berbagi pengetahuan tentang kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan. Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, dapat dilihat pada grafik di bawah.



**IKU 21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran**

<b>SK.04</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</b>					
<b>IK.21</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
-	100	100	77,5	100,00	120,00	

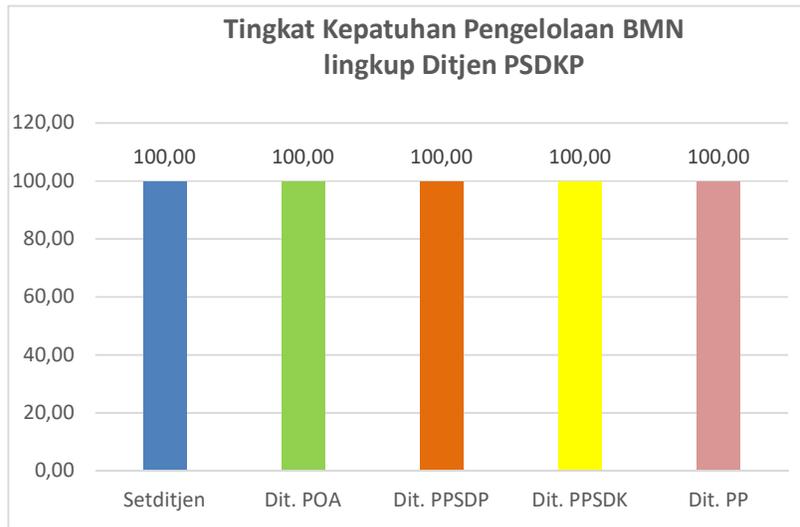
Capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran sebesar 100% dari target pada tahun 2023 sebesar 77,5% diperoleh dari hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) penilaian mandiri sesuai dengan Memorandum Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : 45/PSDKP.1/PL.760/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Hasil penghitungan indikator kinerja kepatuhan pengelolaan BMN dan PBJ lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon II apakah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini karena: 1) pengelolaan rencana kebutuhan BMN; 2) ketersediaan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN; 3) penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi

aset); 4) pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung BAST/ Berita Acara Pemakaian; dan 5) penyusunan laporan BMN yang tepat waktu. Pengukuran indikator kinerja ini menggunakan Lembar kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

Indikator kinerja ini merupakan cermin implementasi dalam pengelolaan BMN yang baik dan tertib, dan agar supaya dipertahankan pada periode selanjutnya.

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN sama, dengan perolehan nilai sebesar 100%. Direktorat PP berkomitmen untuk terus mencapai target pengelolaan BMN sehingga pada tahun 2024 target yang diproyeksikan optimis dapat dicapai.



**IKU 22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran**

<b>SK.04</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</b>					
<b>IK.22</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran</b>					
<b>Realisasi tahun 2020-2022</b>			<b>Tahun 2023</b>			<b>RENSTRA 2024</b>
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% thd tahun 2023</b>	<b>T</b>
-	98,75	100	77,5	100,00	120,00	

Capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran sebesar 100% dari target pada tahun 2023 sebesar 77,5%

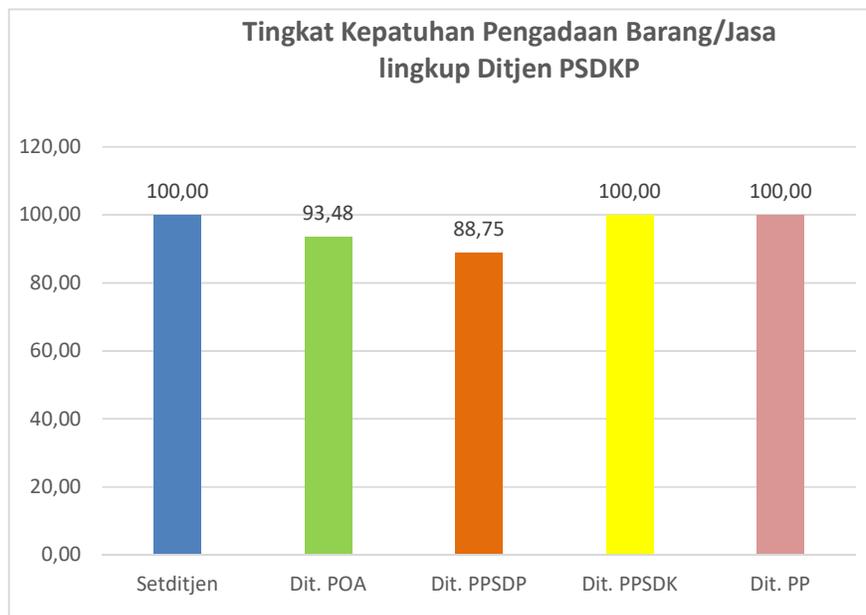
diperoleh dari hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) penilaian mandiri sesuai dengan Memorandum Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : 45/PSDKP.1/PL.760/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Hasil penghitungan indikator kinerja kepatuhan pengelolaan BMN dan PBJ lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023.

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa dilihat berdasarkan : 1) ketersediaan manajemen risiko pengadaan barang jasa strategis; 2) perencanaan dan persiapan pengadaan; 3) persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE; 4) kesesuaian tahap pelaksanaan; 5) laporan penyelenggaraan PBJ; 6) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa. Penghitungan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa. Penghitungan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan pengadaan PBJ.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan tersebut didukung oleh kepatuhan Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Grafik perbandingan capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa level II lingkup Ditjen PSDKP.

Upaya yang sudah dilakukan untuk tepat dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP diantaranya koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka inventarisasi pengadaan barang dan Jasa 2023, penginputan data ke dalam aplikasi SIRUP, pemantauan progres pengadaan barang/jasa secara reguler menggunakan kertas kerja pemantauan, Input pencatatan pengadaan BJ yang sudah dilaksanakan di LPSE.

Grafik perbandingan kinerja ini dengan level II lainnya adalah sebagai berikut.



### C. EFISIENSI

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, telah dilakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal pada triwulan I tahun 2023. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya Ditjen PSDKP sebesar 3,68.

### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran berdasarkan DIPA Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2023 pada PK awal per tanggal 17 Januari 2023 adalah sebesar Rp6.868.400.000,00. Kemudian pagu anggaran memiliki perubahan dikarenakan terdapat kebijakan *Automatic Adjustment (AA)* menjadi sebesar Rp5.465.672.000,00. Realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.443.204.575,00 dengan persentase 99,59%. Rincian anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Penanganan Pelanggaran, sebagai berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Terselenggaranya Penysadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal	1	510.750.000	102.278.023	20,03
2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	5	4.225.120.000	305.887.230	7,24
3	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Sesuai Ketentuan	7	225.000.000	27.448.600	12,20
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	9	498.802.000	242.811.391	48,68
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>5.459.672.000</b>	<b>678.425.244</b>	<b>12,43</b>



## **BAB IV**

# **PENUTUP**

---

### **A. KESIMPULAN**

- 1) Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis Ditjen PSDKP tahun 2023. Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Penanganan Pelanggaran tercapai sesuai dengan target IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran. Hal tersebut membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh komponen yang berkaitan dalam pencapaiannya.
- 2) Indikator kinerja "Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan", "Indeks kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan", "Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan", dan "Persentase kesesuaian penerapan sanksi administratif" merupakan indikator kinerja yang berkontribusi langsung pada pencapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal PSDKP (Level I) dan telah tercapai melebihi target yang ditetapkan.
- 3) Dalam menganalisis perbandingan atau perubahan tren kenaikan/penurunan, terdapat capaian indikator kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelum karena merupakan indikator kinerja baru. Di samping itu, terdapat beberapa indikator kinerja baru yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

### **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan konsolidasi untuk pengendalian kegiatan anggaran dilakukan secara periodik melalui rapat internal bulanan yang dipimpin langsung oleh Direktur selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dihadiri oleh para penanggungjawab kegiatan dan staf yang menangani keuangan dan anggaran. Hal ini penting untuk mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan operasional yang akan mempengaruhi kinerja.
- 2) Melaksanakan monitoring pencapaian target kinerja kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan melalui rapat internal maupun dengan UPT lingkup Ditjen PSDKP.
- 3) Koordinasi dengan UPT lingkup Ditjen PSDKP serta berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah tetap perlu ditingkatkan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi dan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan UPT dan instansi terkait.

## PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN TAHUN 2023 (AWAL)



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Teuku Elvitrasyah**

Jabatan : Direktur Penanganan Pelanggaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal PSDKP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

  
**Adin Nurawaluddin**

Jakarta, Januari 2023  
Pihak Pertama  
Direktur Penanganan Pelanggaran

  
**Teuku Elvitrasyah**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
<b>KEGIATAN 1. PENANGANAN PELANGGARAN</b>				
SK1.1	Terselenggaranya Penyardartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal	1.	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Secara Ilegal (Nilai)	73
SK1.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	2.	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93
		3.	Indeks Kualitas Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70
SK1.3	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Sesuai Ketentuan	4.	Persentase Pengenaan Sanksi Adminstratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	80
		5.	Persentase Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif (%)	80
SK1.4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP	6.	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	100
		7.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	100
		8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Indeks)	78
		9.	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	77
		10.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	90
		11.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		12.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		13.	Jumlah inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Inovasi)	1
		14.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	92
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	77,5
16.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	77,5		

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	6.868.400.000
Total Anggaran		6.868.400.000

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Jakarta, Januari 2023  
Pihak Pertama  
Direktur Penanganan Pelanggaran



Teuku Elvitrasyah

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN TAHUN 2023  
(REVISI TERAKHIR)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346  
WEBSITE: [www.djpsdkp.kkp.go.id](http://www.djpsdkp.kkp.go.id) EMAIL: [ditiensdkp@kkp.go.id](mailto:ditiensdkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teuku Elvitrysyah

Jabatan : Direktur Penanganan Pelanggaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adin Nurawaluddin

Jabatan : Direktur Jenderal PSDKP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Jakarta, 5 Desember 2023  
Pihak Pertama  
Direktur Penanganan Pelanggaran



Teuku Elvitrysyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
<b>KEGIATAN 1. PENANGANAN PELANGGARAN</b>				
1.	Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal	1.	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas ke Negara Lain Secara Ilegal (Nilai)	73
2.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	2.	Indeks Pengenaan Sanksi Adminstratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		3.	Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif (Indeks)	80
		4.	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		5.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		6.	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80
3.	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	7.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
		8.	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70
		9.	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain (Indeks)	70
		10.	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (%)	100
		11.	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	100
		12.	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	77
		13.	Jumlah inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Inovasi)	1
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP	14.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	100
		15.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Indeks)	78
		16.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	80,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
17.		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
18.		Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	99
19.		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
20.		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	92
21.		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	77,5
22.		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	77,5

**Data Anggaran**

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	5.459.672.000
1	<i>Terselenggaranya penyadartahuan yang efektif kepada nelayan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di Negara Lain Tanpa Izin</i>	510.750.000
2	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang berkualitas</i>	4.729.922.000
3	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas</i>	225.000.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>5.465.672.000</b>

Jakarta, 5 Desember 2023

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama  
Direktur Penanganan Pelanggaran



Adin Nurawaluddin



Teuku Elvitrasyah